



Pengaruh Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone

The Influence of Governance and Community Participation on the Effectiveness of Village Fund Management in Mattirobulu Village, Bone Regency

Nina Agustina^{1*}, Herlina Sakawati², Anisa Fitri³, Putri Dzakila Handayani⁴, Dewi Sulfa Saguni⁵

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁵Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*Author correspondence: nina.agustina@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-11-10

Revised:

2025-11-26

Accepted:

2025-11-28

Published:

2025-12-01

Keywords: governance; community participation; effectiveness; management; village funds

Kata kunci: tata kelola; partisipasi masyarakat; efektivitas; pengelolaan; dana desa

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

This study aims to determine the influence of governance and community participation on the effectiveness of village fund management in Mattirobulu Village, Bone Regency. The underlying problem is weak governance, which has a direct impact on the low level of community participation. Governance processes such as Musrenbangdes (Village Development Planning Meeting) are often carried out merely as a formality and not in accordance with regulations, so that community participation in planning is not optimally accommodated. This research is a quantitative study using a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis techniques used include instrument validity and reliability tests, descriptive statistical analysis, normality tests, and inferential statistical analysis. The results show that the coefficient of determination (R Square) for the governance and community participation variables is 0.772. This indicates that governance and community participation together are able to explain 77.2% of the variance in the effectiveness of village fund management in Mattirobulu Village, which can be categorized as strong. This means that good governance is inherently linked to meaningful community participation, and effective village fund management cannot be separated from sound governance systems and active community involvement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata Kelola dan partisipasi Masyarakat dalam efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone. Permasalahan yang

melatarbelakangi yaitu lemahnya tata kelola yang berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat. Proses tata kelola seperti Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dilaksanakan tidak sesuai aturan dan bersifat formalitas, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak terserap dengan baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi variabel tata Kelola dan partisipasi masyarakat terdapat pada nilai R Square sebesar 0.772. berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat secara bersamaan dapat menjelaskan variabel Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattirotulu Kabupaten Bone sebesar 77.2% dan dapat dikategorikan kuat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Tata Kelola dan partisipasi Masyarakat secara Bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattirotulu Kabupaten Bone. Dimana Tata Kelola yang baik pasti melibatkan partisipasi Masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang baik tidak luput dari sistem tata Kelola dan partisipasi yang baik pula.

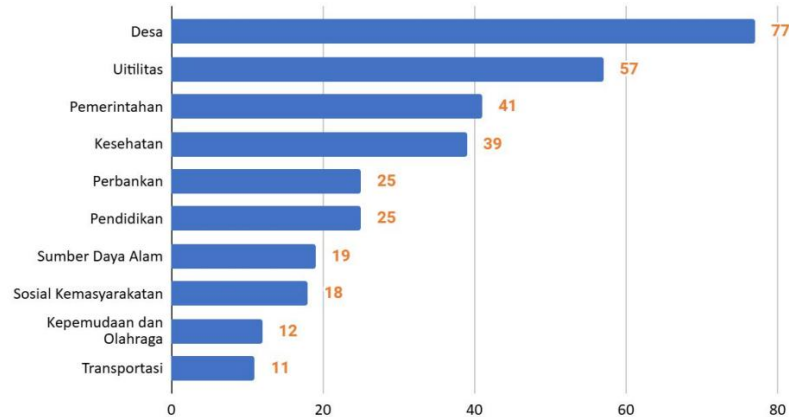
Pendahuluan

Peran strategis desa dalam sistem pemerintahan Indonesia menempatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan lokal. Melalui desentralisasi fiskal, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Kebijakan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi instrumen penting untuk mendukung akselerasi pembangunan di wilayah pedesaan yang berlandaskan prinsip kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Pada tingkat kebijakan, besarnya alokasi Dana Desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa membawa tantangan besar dalam aspek tata kelola dan akuntabilitas. Pengelolaan dana yang efektif tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran (output), tetapi terutama dari tercapainya tujuan (outcome) yang telah ditetapkan, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Ridwan, 2022). Idealnya, pengelolaan tersebut berjalan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran program, rendahnya kualitas pembangunan, hingga potensi penyelewengan dana yang

masih menjadi isu krusial. Hal ini tercermin dari data makro tentang korupsi di tingkat pemerintahan desa.



Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi 2024

Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW, 2025)

Berdasarkan laporan Divisi Hukum dan Investigasi ICW tahun 2025 yang memotret kasus korupsi sepanjang tahun 2024, terlihat bahwa kasus korupsi tertinggi ditemukan di pemerintahan desa dengan jumlah 77 kasus. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya tata kelola dan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga memicu berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran di tingkat desa.

Dalam perspektif administrasi publik, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan di tingkat desa adalah tata kelola (governance). Tata kelola dimaknai sebagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang didasari prinsip-prinsip *good governance*, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Saragih & Alpi, 2023). Tata kelola yang baik di tingkat desa diyakini menjadi fondasi untuk mencegah korupsi serta memastikan alokasi sumber daya publik berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Salah satu pilar penting *good governance* adalah partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik menuntut keterlibatan aktif warga, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga pengawasan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil pembangunan, serta pengawasan terhadap jalannya program Pembangunan (Nurfitri & Ratnawati, 2023). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) idealnya menjadi ruang partisipatif yang menjamin aspirasi masyarakat terserap dengan baik, sehingga program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat (*bottom-up planning*), bukan sekadar proyek yang dirancang oleh perangkat desa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Namun, masih relatif terbatas penelitian yang secara simultan menguji kontribusi tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas

pengelolaan Dana Desa pada konteks desa tertentu dengan permasalahan tata kelola yang nyata. Selain itu, kajian yang secara spesifik menyoroti dinamika tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Mattiro Bulu, masih jarang ditemukan. Celah ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi untuk memperkaya literatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Desa Mattiro Bulu di Kabupaten Bone, sebagai salah satu penerima Dana Desa, tidak luput dari dinamika tersebut. Desa ini dihadapkan pada tuntutan untuk mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar mampu memberikan dampak pembangunan yang nyata. Hasil observasi awal menunjukkan adanya sejumlah permasalahan pengelolaan Dana Desa yang berakar pada lemahnya tata kelola dan rendahnya partisipasi masyarakat. Proses tata kelola seperti Musrenbangdes dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan cenderung bersifat formalitas, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak terserap dengan baik. Kelemahan tata kelola ini diperburuk oleh minimnya transparansi, misalnya papan informasi APBDes yang tidak terpasang atau tidak diperbarui, sehingga menutup ruang bagi masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, pengawasan internal oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menjadi tidak efektif, kepala desa cenderung terlalu dominan, dan terbuka celah akuntabilitas yang berpotensi bermuara pada *mark-up* anggaran maupun dugaan proyek fiktif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh tata kelola terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu, Kabupaten Bone, 2) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu, Kabupaten Bone, 3) Bagaimana pengaruh tata kelola dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu, Kabupaten Bone.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola dan partisipasi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan, terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu, Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai faktor-faktor penentu efektivitas pengelolaan keuangan desa serta rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Bone dalam memperkuat tata kelola dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan Dana Desa.

Kajian Literatur

Konsep Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan merupakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan, serta prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif, birokrasi, masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi. Pemerintahan yang baik memandang kekuasaan sebagai amanah untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Halim dan Kusufi (2014) memaknai *good governance* sebagai penyelenggaraan kekuasaan negara yang

berorientasi pada penyediaan public goods and services dengan kualitas prima bagi masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, Mahmudi (2018) menekankan pentingnya sistem, prosedur, dan metode yang jelas agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara adil (Walangitan et al., 2020).

Dalam keuangan publik, tata kelola yang baik merupakan dasar penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan akuntabel (Lumban Gaol et al., 2024). Pada tingkat desa, tata kelola dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa (Saragih & Alpi, 2023). Implementasi tata kelola dana desa idealnya sejalan dengan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, konsensus, efektivitas dan efisiensi, keadilan, akuntabilitas, serta visi strategis (Wahyuni & Yulistiyono, 2021).

Secara operasional, tata kelola dana desa dapat diukur menggunakan lima indikator Nasion dalam Lumban Gaol et al (2024), yaitu: (1) pencapaian anggaran, (2) pengumpulan pendapatan, (3) pelaksanaan anggaran, (4) pelaporan keuangan, dan (5) audit serta pengawasan. Indikator-indikator tersebut menegaskan bahwa tata kelola tidak hanya menyangkut kepatuhan prosedural, tetapi juga kualitas pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks dana desa, kelemahan pada salah satu aspek—misalnya pelaporan atau pengawasan—dapat membuka peluang penyimpangan dan pada akhirnya menurunkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik dan proses pembangunan. Partisipasi didefinisikan sebagai peran serta individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan (Kaehe et al., 2019). Dalam tata kelola keuangan publik, partisipasi aktif masyarakat, terutama pada proses penganggaran dan pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah (Lumban Gaol et al., 2024). Pengelolaan dana desa secara normatif juga dipersyaratkan dilaksanakan dengan asas partisipatif (Nurfitri & Ratnawati, 2023).

Partisipasi masyarakat dapat diukur melalui beberapa tahap. Menurut Gunawan & Subadi (2021) yang mengutip Slamet (1993), bentuk partisipasi masyarakat dapat dikategorikan menjadi: (1) partisipasi pada tahap perencanaan, (2) partisipasi pada tahap pelaksanaan, dan (3) partisipasi pada tahap pemanfaatan. Dalam konteks dana desa, ketiga tahap tersebut mencerminkan keterlibatan masyarakat mulai dari Musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik, hingga pemanfaatan dan pengawasan hasil pembangunan.

Secara teoritis, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap pengelolaan dana desa. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi acap kali bersifat formalitas atau didominasi elite lokal, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi warga secara luas. Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat menjadi variabel kunci: ketika partisipasi substantif menguat, tekanan sosial terhadap pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel juga meningkat;

sebaliknya, partisipasi yang lemah memperlebar ruang bagi praktik pengelolaan dana yang tidak efektif.

Efektivitas Pengelolaan dana desa

Pengelolaan alokasi dana desa yang baik diperlukan untuk mendorong pembangunan desa yang semakin maju dan merata (Nurfitri & Ratnawati, 2023). Realisasi dana desa merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui perbaikan layanan publik dan penguatan infrastruktur dasar. Karena itu, efektivitas pengelolaan dana desa tidak cukup diukur dari sisi penyerapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun nonfisik (Nayanti et al., 2025).

Menurut Steers dalam Fitriyanti et al., (2022), efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator: (1) pencapaian tujuan, (2) integrasi, dan (3) adaptasi. Dalam pengelolaan dana desa, pencapaian tujuan berkaitan dengan terpenuhinya sasaran program yang telah direncanakan; integrasi mencerminkan kemampuan koordinasi antar aktor desa (pemerintah desa, BPD, dan masyarakat); sedangkan adaptasi menunjukkan kemampuan pengelolaan dana desa menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lokal.

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa umumnya mengkaji apakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (Rahayu, 2019). Namun, pendekatan yang hanya menekankan kepatuhan prosedural berisiko mengabaikan dimensi hasil (*outcome*), yakni sejauh mana dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini dipahami sebagai kombinasi antara kesesuaian proses dengan regulasi dan ketercapaian hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Hubungan Antar Variabel

Secara konseptual, tata kelola dan partisipasi masyarakat saling berkaitan dan bersama-sama mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Tata kelola dana desa yang baik—ditandai oleh perencanaan yang jelas, pelaksanaan anggaran yang tertib, pelaporan yang transparan, serta audit dan pengawasan yang efektif—menjadi prasyarat struktural bagi pengelolaan dana desa yang efektif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang kuat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil berfungsi sebagai prasyarat sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, secara argumentatif dapat dirumuskan bahwa:

1. Tata kelola yang baik meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa karena mengurangi potensi kesalahan, inefisiensi, dan penyimpangan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan.
2. Partisipasi masyarakat yang tinggi memperkuat efektivitas pengelolaan dana desa melalui mekanisme kontrol sosial, penajaman prioritas program

sesuai kebutuhan riil, dan peningkatan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

3. Ketika tata kelola dan partisipasi masyarakat berjalan sinergis, peluang terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif–baik dari sisi proses maupun hasil–menjadi semakin besar.

Dengan demikian, tidak hanya mendeskripsikan masing-masing variabel, tetapi juga menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh kombinasi kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat. Kerangka teoritis ini menjadi dasar bagi pengujian empiris dalam penelitian mengenai pengaruh tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattiro Bulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (explanatory research). Penelitian kuantitatif eksplanatif digunakan untuk menguji pengaruh tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu, Kabupaten Bone (Creswell, 2019). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Penelitian dilaksanakan di Desa Mattiro Bulu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai salah satu desa penerima Dana Desa. Lokasi ini dipilih secara purposive karena berdasarkan observasi awal terdapat indikasi permasalahan tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam satu periode kegiatan penelitian (satu kali cross-sectional survey) pada tahun pelaksanaan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu, yang terdiri atas: aparat desa sebanyak 9 orang, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 5 orang, kepala dusun sebanyak 4 orang, anggota karang taruna sebanyak 16 orang, dan anggota PKK sebanyak 5 orang. Dengan demikian, total populasi berjumlah 39 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh (saturated sampling). Menurut Sugiono (2018), sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Teknik ini digunakan bukan hanya karena jumlah populasi relatif kecil (<50 orang), tetapi juga karena seluruh unit populasi merupakan aktor yang relevan dan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, seluruh populasi sebanyak 39 orang dijadikan sampel penelitian. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Kuesioner disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai tata kelola, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan Dana Desa

Langkah selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, penyebaran Kuesioner dan melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Setelah data

yang diperlukan terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi komputer SPSS ver. 26 dengan melakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan analisis statistik inferensial untuk memperoleh hasil penelitian. langkah terakhir yang dilakukan penulis ada melakukan analisis hasil pengolahan data penelitian yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada bagian metode penelitian, akan dilakukan analisis data untuk melihat pengaruh tata Kelola dan partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone. Berikut disajikan hasil dan pembahasan dari analisis data yang dilakukan.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Tata Kelola (X1)

Tata Kelola dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone diukur menggunakan 5 (lima) indikator teori yang dikemukakan oleh Nasion dalam Lumban Gaol et al., (2024) sebagai berikut : 1) pencapaian anggaran, 2) pengumpulan pendapatan, 3) pelaksanaan anggaran, 4) pelaporan keuangan, dan 5) audit dan pengawasan. Dari 5 indikator tersebut kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel X1

No.	Indikator	Persen(%)	Ket.
1	Perencanaan Anggaran	75,6	Baik
2	Pengumpulan Pendapatan	73,1	Baik
3	Pelaksanaan Anggaran	72,3	Baik
4	Pelaporan Keuangan	76,7	Baik
5	Audit Dan Pengawasan	74,1	Baik
	Rata-Rata	74,4	Baik

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat rata-rata persentase pencapaian kelima indikator tata Kelola dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone sebesar 74,4 dengan kategori baik. Dengan demikian, meskipun secara umum tata kelola Dana Desa di Desa Mattiro Bulu sudah berada pada kategori *baik*, komposisi nilai per indikator menunjukkan bahwa penguatan masih terutama diperlukan pada aspek pelaksanaan anggaran dan pengumpulan pendapatan, agar praktik tata kelola tidak hanya "baik" secara administratif, tetapi juga semakin efektif dan berdaya guna dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

Partisipasi Masyarakat dalam efektivitas pengelolaan dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone diukur menggunakan 4 indikator yang dikemukakan oleh Slamet dalam Gunawan & Subadi (2021) sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) partisipasi dalam pelaksanaan, dan 3)

partisipasi dalam pemanfaatan. Dari 3 indikator tersebut kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel X2

No.	Indikator	Persen(%)	Ket.
1	Partisipasi Dalam Perencanaan	75,2	Baik
2	Partisipasi Dalam Pelaksanaan	73,7	Baik
3	Partisipasi Dalam Pemanfaatan	73,2	Baik
	Rata-Rata	74,0	Baik

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat rata-rata persentase pencapaian ketiga indikator partisipasi Masyarakat dalam efektivitas pengelolaan dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone sebesar 74,0% dengan kategori baik. Dengan demikian, nilai rata-rata 74,0% bukan hanya sekadar menunjukkan kategori "baik" secara statistik, tetapi juga memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat di Desa Mattiro Bulu sudah cukup mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa, namun masih menyisakan ruang penguatan, khususnya pada aspek pelaksanaan dan pemanfaatan hasil agar partisipasi menjadi lebih substantif dan inklusif, bukan sekadar formalitas.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Efektivitas pengelolaan dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone diukur menggunakan 3 indikator yang dikemukakan oleh Steers dalam Fitriyanti et al., (2022) sebagai berikut: 1) Pencapaian tujuan, 2) integritas, dan 3) adaptasi. Dari 3 indikator tersebut kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y

No.	Indikator	Persen(%)	Ket.
1	Pencapaian Tujuan	75,0	Baik
2	Integritas	72,6	Baik
3	Adaptasi	74,9	Baik
	Rata-Rata	74,2	Baik

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat rata-rata persentase pencapaian ketiga indikator efektivitas pengelolaan dana desa di desa mattirobulu kabupaten bone sebesar 72,4% dengan kategori baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian untuk menguji apakah dalam model regresi variabel regresi memiliki distribusi normal. Pengujian yang akan dilakukan Adalah uji normalitas. Dengan melakukan pengujian ini kita bisa melihat data dari

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	11.16213100
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.055
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.240 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari table 4 diatas, dapat dilihat nilai Asymp. Sig.(2-tailed) dari 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.240 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 atau (5%), sehingga dapat dipastikan bahwa semua variabel yang digunakan terdistribusi dengan normal.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel Tata Kelola, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas pengelolaan dana desa. Berikut hasil pengujian yang diperoleh:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	6.125	3.332	2.343	.031
	Tata Kelola (X1)	.831	.267	.113	.028
	Partisipasi Masyarakat (X2)	.544	.378	.607	.002

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS ver. 26 pada tabel 5 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6.125 + 0.831 (X1) + 0.544(X2)$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Nilai *Constanta* adalah 6.125 dengan tanda positif, artinya apabila Tata kelola dan Partisipasi masyarakat dianggap konstan maka nilai Y adalah 6.125
- Nilai koefisien Tata Kelola (X1) sebesar 0.831 dengan tanda positif, menyatakan apabila Tata kelola naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Efektivitas Pengelolaan dana Desa akan naik sebesar 0.831.
- Nilai koefisien Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 0.544 dengan tanda positif, menyatakan apabila nilai Partisipasi Masyarakat naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Efektivitas Pengelolaan dana Desa akan naik sebesar 0.544.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat pada kolom t dan nilai Sig. dengan penjelasan sebagai berikut: variabel Tata Kelola (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di desa Mattirobulu Kabupaten Bone. Hal tersebut berdasarkan pada nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.877 > 1.688$) dan nilai signifikannya yaitu $0.028 < 0.05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Tata Kelola terhadap Efektivitas pengelolaan dana desa di desa Mattirobulu Kabupaten Bone. Variabel Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di desa Mattirobulu Kabupaten Bone. Hal tersebut berdasarkan pada nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.453 > 1.688$) dan nilai signifikannya yaitu $0.002 < 0.05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Partisipasi masyarakat terhadap Efektivitas pengelolaan dana desa di desa Mattirobulu Kabupaten Bone.

Analysis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam mempengaruhi variasi variabel dependen. Nilai *R Square* yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji *R Square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Analisis Koefisien Determinasi X1 terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.722	.743	5.441
a. Predictors: (Constant), Tata Kelola (X1)				

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari table 6 diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *R Square* sebesar 0.722. berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa

kemampuan variabel Tata Kelola dapat menjelaskan variabel Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattiobulu Kabupaten Bone sebesar 72.2% dan dapat dikategorikan kuat.

Tabel 7. Analisis Koefisien Determinasi X2 terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.554	.610	4.752

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X2)

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari table 7 diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *R Square* sebesar 0.554. berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variabel Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattiobulu Kabupaten Bone sebesar 55.4% dan dapat dikategorikan sedang.

Tabel 8. Analisis Koefisien Determinasi X1 dan X2 terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.897	9.646

a. Predictors: (Constant), Tata Kelola, Partisipasi Masyarakat

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS v.26 tahun 2025

Dari table 8 diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *R Square* sebesar 0.772. berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat secara bersamaan dapat menjelaskan variabel Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattiobulu Kabupaten Bone sebesar 77.2% dan dapat dikategorikan kuat.

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiobulu Kabupaten Bone

Tata Kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu Lembaga atau Masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam suatu instansi (Wadjo et al., 2025). Penerapan tata Kelola dimaksudkan agar semua aset dan sumber daya di suatu wilayah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga luaran (*Output*) maupun hasil (*Outcome*) yang diperoleh sesuai dengan harapan Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa tata Kelola dana desa di Desa Mattiobulu Kabupaten Bone telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian berada dalam kategori baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasari et al., (2024) yang membahas tentang Efektivitas Tata Kelola Dana

Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa Tata Kelola anggaran dana desa, secara prosedural maupun teknis pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang mencakup unsur transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib. Akan Tetapi masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan pengelolaannya belum begitu kondusif dalam menjalan asas atau prinsip dimaksud. Kurangnya swadaya masyarakat desa, belum terpenuhinya kebutuhan berdasarkan pada alokasi serta pengetahuan masyarakat terhadap realisasi anggaran membuat tata Kelola keuangan desa di desa masih perlu perhatian lebih.

Hasil analisis koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh nilai R Square sebesar 0.722 atau 72.2%. Nilai ini menjelaskan bahwa Tata Kelola mempunyai pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di desa mattirobulu Kabupaten Bone. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik tata Kelola yang dilakukan oleh pemerintah maka semakin baik pula pengelolaan dana desa begitupula sebaliknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Alpi (2023) yang membahas tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. Hasil penelitian yang berkaitan dengan tata Kelola yang dilakukan diperoleh hasil uji hipotesis secara langsung mempunyai koefisien jalur sebesar -0.051. pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p -values) sebesar $0.820 > 0.05$, berarti dapat disimpulkan bahwa tata kelola dana desa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada kecamatan serba jadi.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, hingga memiliki dampak dalam proses evaluasi maupun pengendalian kinerja pemerintah serta meminimalkan penyelewengan kewenangan (Putra & Rasmini dalam Saragih & Alpi, 2023). Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bawah Masyarakat desa Mattirobulu ikut aktif dalam proses pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dapat dilihat dari pengujian hasil analisis deskriptif dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian berada dalam kategori baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri & Ratnawati (2023) yang membahas tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Hasil analisis koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh nilai R Square sebesar 0.554 atau 55.4%. Nilai ini menjelaskan bahwa partisipasi Masyarakat memberikan pengaruh yang cukup terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone. Semakin aktif Masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

semakin baik dan terkontrol pula pengelolaan dana desanya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakdiyah et al., (2023) yang membahas tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, hal ini disebabkan karena pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, diantaranya terlibatnya masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan APBDes. Sejalan dengan teori stewardship yang mengatakan manajer termotivasi oleh tujuan organisasi dibanding tujuan individu.

Pengaruh Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone

Tata Kelola merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan Masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengontrol agar pemerintah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan dana desa kedua hal tersebut saling beriringan agar *Output* dan *Outcome* yang ingin dicapai pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Masyarakat. Dari hasil pengujian koefisien determinasi yang dilakukan, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0.772 atau 77.2% yang dapat dikategorikan Kuat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Tata Kelola dan partisipasi Masyarakat secara Bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone. Dimana Tata Kelola yang baik pasti melibatkan partisipasi Masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang baik tidak luput dari sistem tata Kelola dan partisipasi yang baik pula.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan inferensial, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Bulu secara umum berada pada kategori *baik* dengan rata-rata skor sekitar 74%. Analisis regresi menunjukkan bahwa tata kelola dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, dengan kemampuan menjelaskan variasi efektivitas hingga sekitar 77,2%. Secara teoritis, temuan ini menguatkan rangka "good governance" dan teori partisipatif bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel serta partisipasi masyarakat yang bermakna merupakan determinan penting efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Di saat yang sama, hasil ini juga memberi nuansa baru terhadap temuan-temuan sebelumnya yang tidak selalu menemukan pengaruh signifikan tata kelola, sehingga menegaskan pentingnya konteks lokal dalam mengkaji efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi langsung bagi pemerintah Desa Mattiro Bulu dan desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Pemerintah desa perlu memprioritaskan penguatan aspek tata kelola yang

nilainya relatif lebih rendah, seperti pelaksanaan anggaran dan pengelolaan pendapatan, serta meningkatkan kualitas koordinasi dan integrasi antar aktor (pemerintah desa, BPD, kelembagaan desa, dan kelompok masyarakat). Di sisi partisipasi, temuan bahwa masyarakat sudah “baik” tetapi belum “sangat baik” mengisyaratkan perlunya peningkatan partisipasi yang lebih substantif, terutama pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil—misalnya dengan menjadikan Musrenbangdes lebih inklusif, memperkuat peran BPD dan lembaga desa dalam pengawasan, serta memastikan transparansi informasi (seperti APBDes) agar masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Pertama, desain penelitian yang bersifat potong lintang (*cross-sectional*) dan dilakukan hanya pada satu desa dengan jumlah responden terbatas menyebabkan generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, pengukuran variabel didasarkan pada persepsi responden melalui kuesioner sehingga sangat bergantung pada subjektivitas dan kemungkinan *social desirability bias*. Ketiga, model penelitian hanya memasukkan dua variabel independen (tata kelola dan partisipasi masyarakat), padahal efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat mungkin juga dipengaruhi faktor lain, seperti kapasitas aparatur, kualitas akuntabilitas, atau sistem informasi keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) menggunakan desain multi-lokasi dan jumlah sampel yang lebih besar; (2) mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (misalnya wawancara mendalam dan studi dokumen) agar proses tata kelola dan dinamika partisipasi dapat dipahami lebih kontekstual; serta (3) memasukkan variabel lain seperti transparansi, akuntabilitas, kapasitas aparatur, atau peran lembaga pengawasan sebagai variabel mediasi atau moderasi dalam model penelitian.

Referensi

- Creswell, J. W. (2019). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran)*. Pustaka Pelajar.
- Fitriyanti, A., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43-59.
- Gunawan, R., & Subadi, W. (2021). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bak Air Di Rt. 15 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis (JAPB)*, 4(1), 521-528.
- ICW. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan tren Korupsi 2024*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PPT_Tren_Korupsi_2024.pdf
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14-24.

- Kurniasari, R., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2024). Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 662-673. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.226>
- Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126-140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Nayanti, D., Affrian, R., & Sugianor. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 2(1), 56-65. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKDPK/article/view/1190>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1794-1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten Paser. *EJurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681-1692. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>
- Ridwan. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh.
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wadjo, D. N., Syauta, J. H., & Kambuaya, Q. F. (2025). Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat. *Adhigana Papua: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1).
- Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(2), 155-166. <https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/185>
- Walangitan, N., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2020). Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *Going Concern* :

Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 219.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28199.2020>